



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

2024



JL. Margantara No. 460 Tanjung  
Tlp : 637211

<http://dinhub.banyumaskab.go.id/>







## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, yang mana telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdapat 4 indikator kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2024.

Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan IV, keempat indikator kinerja Dinas Perhubungan telah mencapai target seluruhnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tetap akan berusaha dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan lagi capaian kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perhubungan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.





## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

---

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 akan bermanfaat bagi peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 31 Januari 2025



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**AGUS SRIYONO, ATD., S.IP., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670801 199203 1 006





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sesuai dengan target yang telah menjadi komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasarkan target kinerja dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program serta beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan strategi yang diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 mencapai 100 % termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas 2024. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) Indikator Kinerja Utama tercapai 100 % dengan kategori "Tercapai";

Dari 4 (empat) indikator kinerja utama, telah tercapai dari perencanaan yang ditargetkan. Ada 1 indikator kinerja yang melebihi 100 % yakni " V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota" mencapai 139.19 %.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukan 4 (empat) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan presentase penyerapan anggaran kurang dari 100%. Dimana capaian anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mencapai 95,35 %, yakni dengan pagu anggaran Rp. 34.541.288.661 terealisasi sebesar Rp. 32.936.440.832

Adapun hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 mendapat predikat "A" dengan nilai 88,40. Selanjutnya rekomendasi yang disampaikan dari Inspektorat Daerah





Kabupaten Banyumas atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2024, sampai dengan saat ini masih terus ditindaklanjuti. Selain itu pada tahun 2024 juga telah direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan **Banyumas Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing, Serta Lestari**





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	10
C. Susunan Organisasi	11
D. Sumber Daya Aparatur	14
E. Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
C. Rencana Anggaran Tahun 2024	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Analisis Capaian Kinerja	32
C. Realisasi Anggaran	49
D. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	50
E. Perstasi Dinas Perhubungan	51
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	52
B. Progres Penyelesaian Isu-Isu Strategis	53





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan- -----14

Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan Jenis Kelamin -----14

Tabel 1.3 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat Eselon -----15

Tabel 1.4 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas Tahun berdasarkan Golongan/Ruang -----15

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 -----26

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 -----27

Tabel 2.3 Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 -----28

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-----31

Tabel 3.2 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-----32

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2024-----33

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra-----35

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten-----35

Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas-----37

Tabel 3.7 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-----38

Tabel 3.8 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-----40

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2024-----41

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra-----43

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten-----44

Tabel 3.12 Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas-----46

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024





Tabel 3.13 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-----47

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024----49

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Per Sasaran Tahun 2024-----49

Tabel 3.16 Tingkat Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran-----50

Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya-----50





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-





undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

**B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional





- dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

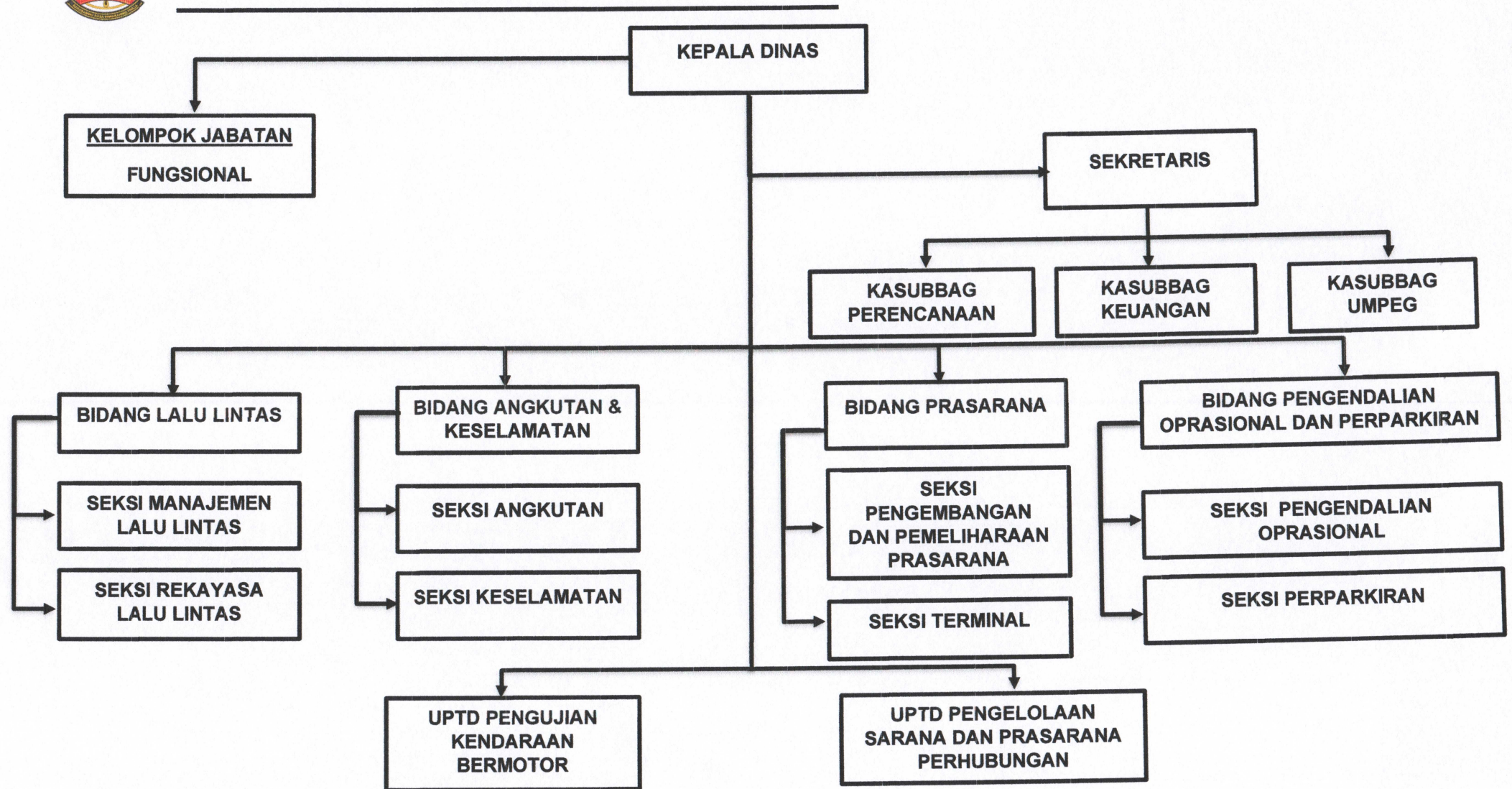
### **C. SUSUNAN ORGANISASI**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :





## Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas







D. SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas didukung oleh sejumlah pegawai yang tertanggal 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 204 pegawai dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 1.1  
Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas  
berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah P3K	Jumlah PTT	Jumlah PHL	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	5				
2.	Sarjana (S1)	12			29	
3.	Diploma (D4)	3			8	
4.	Sarjana Muda (D3)	17			6	
5.	Diploma (D2)	5	2			
6.	SLTA	18			88	
7.	SLTP	4			3	
8.	SD	2			2	
	Total	66	2		136	

Tabel 1.2  
Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas  
berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah PNS	Jumlah P3K	Jumlah PTT	Jumlah PHL	Jumlah
1.	Laki-laki	50	2		114	166
2.	Perempuan	16			22	38
	Total	66	2		136	204





Tabel 1.3  
Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas  
berdasarkan tingkat Eselon

No.	Tingkat Eselon	Jumlah (Orang)
1.	II. A	0
2.	II. B	1
3.	III. A	0
4.	III. B	4
5.	IV. A	12
6.	IV. B	2
Total		19

Tabel 1.4  
Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas Tahun  
berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/Ruang PNS	Jumlah (Orang)
IV/d	
IV/c	1
IV/b	
IV/a	5
III/d	10
III/c	1
III/b	6
III/a	11
II/d	8
II/c	13
II/b	5
II/a	4
I/d	2
I/c	





Gol/Ruang PNS	Jumlah (Orang)
I/b	
I/a	
Total	66

E. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan, yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun ke depan adalah :

1. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka otomatis pergerakan orang dan barang juga mengalami peningkatan, sehingga diperlukan ruang lalu lintas yang memadai baik dari segi kualitas jalannya termasuk kesediaan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung keselamatan jalan
2. Seiring berakhirnya MoU Trans Banyumas Program *Buy The Service* pada akhir tahun 2025, mulai tahun 2026, Pemda Banyumas harus secara bertahap mengambil alih Program BTS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Adanya Kemacetan yang parah di perlintasan sebidang KA Pasirmuncang dan Kaliwangi Rawalo memerlukan penanganan segera, berupa pembangunan flyover atau underpass, sesuai dengan kajian yang telah disusun.
4. Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji dalam wilayah Kabupaten Banyumas perlu diimbangi dengan penambahan atau peremajaan alat uji yang ada dan perbaikan fasilitas pendukung untuk para pengguna layanan pengujian dalam rangka memperlancar serta meningkatkan kualitas pelayanan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Adapun beberapa





catatan tim akreditasi dari Kementerian Perhubungan pada saat melaksanakan penilaian akreditasi UPTD PKB di Banyumas, yaitu:

- a. UPTD PKB Dinas Perhubungan Kab. Banyumas belum memiliki akses keluar masuk kendaraan yang memadai (tidak memiliki pintu gerbang keluar dan masuk, akses jalan keluar belum 100% di cor/diaspal)
  - b. Tembok pagar dinding keliling belum 100% terbangun, padahal didalam area UPTD PKB terdapat 2 gedung yang memiliki nilai aset milyaran rupiah.
5. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada persimpangan yang diatur dengan alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL) pada wilayah perkotaan Purwokerto telah dikembangkan sistem pengaturan yang semula dengan manual dengan menggunakan Program ATCS (*Area Traffic Control System*) di beberapa titik simpang. Penambahan program ATCS perlu dilakukan pada APILL di beberapa simpang supaya kontrol traffic dapat dilakukan dengan lebih maksimal.
  6. Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai jalur lintasan mobilitas antar provinsi untuk angkutan barang dan orang, dengan memperhatikan jarak pada posisi titik lelah pengemudi harus istirahat, maka perlu dibangunnya rest area pada jalan Provinsi/Nasional di Kabupaten Banyumas.
  7. Dengan semakin meningkatnya penggunaan mobil pribadi, dikarenakan semakin menurunnya tingkat pelayanan angkutan umum yang cenderung mahal dan kurang memenuhi standar keselamatan yang memadai, perlu mendorong masyarakat untuk menggunakan *bus rapid transit* yang telah ada. Dalam upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum tersebut, perlu dilakukan pengembangan sarana prasarana seperti penambahan halte bagi para calon penumpang *bus rapid transit* supaya para calon penumpang merasa aman, nyaman dalam menunggu BRT.
  8. Dengan berkembangnya industri di Kecamatan Ajibarang melalui pembangunan pabrik semen, untuk mengurangi beban kerusakan jalan, pengangkutan barang sebaiknya dilakukan menggunakan angkutan kereta api. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan terminal angkutan barang atau dry port di wilayah Kabupaten Banyumas.





9. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan, telah dibangun Taman Edukasi Keselamatan Transportasi Darat. Namun, masih diperlukan tambahan fasilitas, seperti gedung, yang dapat berfungsi sebagai tempat sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas.
10. Peningkatan pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa di wilayah perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir kendaraan menyebabkan penggunaan badan jalan sebagai area parkir. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas gedung atau taman parkir menjadi kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas pergerakan orang dan barang. Selain itu, ketiadaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) serta gembok atau mobil derek menyulitkan upaya penindakan terhadap pelanggar parkir.
11. Meningkatkan mobilitas orang pada simpul transportasi jalan, maka untuk melayani kebutuhan angkutan kota/pedesaan pada simpul terminal telah dibangun Terminal tipe C pada simpul yang memenuhi persyaratan. Penambahan Terminal Tipe C perlu dibangun di daerah Sokaraja.
12. Pengoperasionalan terminal pada tahun 2024 menghadapi tantangan serius akibat banyaknya kios yang mengalami kerusakan serta fasilitas umum yang rusak, termasuk kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase. Kerusakan kios berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Daerah karena kios yang tidak dapat disewakan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh pada kios yang rusak guna memastikan ketersediaan dan fungsionalitasnya
13. Adanya ketentuan usia teknis kendaraan untuk Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan berdasarkan Perda No. 1 tahun 2015, seiring dengan Permen No. 98 Tahun 2019 yang menetapkan usia teknis Angkutan Kota selama 20 tahun dan Angkutan Pedesaan selama 15 tahun. Kondisi ini mengakibatkan beberapa kendaraan tidak dapat melaksanakan izin trayeknya karena telah melewati batas usia yang diatur, sesuai dengan regulasi yang berlaku.





14. Diperlukan kajian teknis terkait jumlah kendaraan di suatu kawasan untuk menentukan kuota layanan, mengingat belum adanya pengaturan terkait berapa kendaraan yang akan melayani dalam satu kawasan. Hal ini menjadi krusial agar para penumpang dapat terlayani dengan baik dan sampai ke kawasan tujuan mereka.
15. Perkembangan sektor pariwisata di Banyumas perlu diimbangi dengan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, fasilitas perlengkapan jalan dan penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan yang memadai termasuk ruang istirahat bagi pengemudi (khususnya sopir bus)





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah Kabupaten Banyumas. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Banyumas terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten





Banyumas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan *stakeholder*.

Pada tahun 2024, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengalami perubahan sejalan dengan evaluasi RPD Kabupaten Banyumas, yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 mencakup penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan daerah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Banyumas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Banyumas yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi pembangunan dalam RPD Kabupaten Banyumas adalah: **BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI.**

### b. Misi

Untuk mewujudkan Misi tersebut, Pimpinan Daerah meletakkan misi-misi yang mendukung visi. Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) misi, sebagai berikut :

- 1) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera.
- 2) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri





- 3) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing.
- 4) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari.

Setiap OPD nantinya akan mengarah pada pencapaian unsur misi RPJPD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengarah pada pencapaian unsur misi ke-3 pada RPJPD yaitu : **Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing.**

**c. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati Banyumas serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebanyak 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:





Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Satu-an	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Konektivitas Wilayah		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan Sungai,danau dan penyeberangan})$		0.7025	0.79	0.785	0.785	0.785	0.785
	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	(Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)		0.125	0.75	0.75	0.75	0.125	0.5
		Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	(Jumlah trayek yg dilayani pada Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut)		0.8	0.8	0.8	0.8	0.78	0.8
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		0.6	0.6	0.74	0.74	0.74	0.74





B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas  
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0.785
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	0.75
		Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	0.8
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten Kota	0.74





C. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp 28.891.951.911 dan Belanja Modal sebesar Rp 5.649.336.750 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.423.394.953	APBD, INSENTIF FISIKAL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 17.177.893.708	APBD,BANTUAN KEUANGAN KHUSUS, INSENTIF FISIKAL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.000.000	APBD





### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas, serta mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara





Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024, yang mana telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan terdiri dari 1(satu) indikator;
- Sasaran 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) indikator;

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas





Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 024/12272/2021.

Hasil pengukuran atas indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Tujuan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan 1						
Meningkatnya Konektivitas Wilayah						
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100%	Tercapai
Sasaran 1						
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah						
1	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100 %	Tercapai
2	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100%	Tercapai
3	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.45	139.19%	Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah sebesar 109.80%.





B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Tujuan : **Meningkatnya Konektivitas Wilayah**
- a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024
- Perbandingan antara target dan realisasi indikator tujuan Meningkatkan Konektivitas Wilayah tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.45	139.19

Tahun 2024 menandai awal pelaksanaan Renstra 2024–2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan satu tujuan dengan satu indikator utama, yaitu "**Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota**". Indikator ini dihitung menggunakan rumus :

$$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Penyeberangan})$$

Data yang digunakan berasal dari trayek angkutan jalan dan angkutan sungai. Dalam perhitungan ini, IK1 merupakan indeks konektivitas angkutan jalan, sedangkan IK2 adalah indeks konektivitas angkutan sungai. Kabupaten Banyumas memiliki bobot angkutan jalan lebih tinggi dibandingkan angkutan sungai, dengan nilai *Bobot Angkutan Jalan* sebesar 0,7 dan *Bobot Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP)* sebesar 0,3. Dengan perhitungan:  $(0,8 \times 0,7) + (0,75 \times 0,3) = 0,785$ . Sehingga, indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah mencapai target 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya
- Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan meningkatnya konektivitas wilayah tahun 2024 dengan realisasi dan





capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.685	0.685	100
Tahun 2022				
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.827	0.7025	84.89
Tahun 2023				
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.89	0.79	88.76
Tahun 2024				
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan satu tujuan dengan satu indikator kinerja, sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran, secara keseluruhan Dinas Perhubungan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk indikator *Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota* tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur konektivitas sungai, di mana hanya terdapat dua dermaga, sementara target yang ditetapkan adalah tiga dermaga. Akibatnya, layanan angkutan sungai hanya mencakup satu trayek. Pembangunan Dermaga Kedunguter direncanakan menggunakan APBN, yang merupakan faktor eksternal di luar kendali daerah. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan perlu menyesuaikan indikator dengan mengecualikan faktor eksternal,





mengingat pembangunan dermaga di Kabupaten Banyumas sangat bergantung pada APBN yang tidak selalu dapat dipastikan. Penyesuaian ini mencakup pengurangan target jumlah dermaga agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melakukan peninjauan dan perhitungan ulang terhadap indikator capaian kinerja. Pada indikator *Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota*, terjadi perubahan perhitungan bobot angkutan jalan dan angkutan sungai. Jika pada tahun 2022 bobot angkutan jalan sebesar 0,8 dan angkutan sungai 0,5, setelah ditinjau oleh Kemendagri, perhitungan rasio konektivitas wilayah disesuaikan menjadi *Bobot Angkutan Jalan* 0,7 dan *Bobot Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP)* 0,3. Selain itu, pada indikator *Indeks Angkutan Sungai*, terjadi perubahan pola layanan atau *rerouting* trayek. Jika pada tahun 2022 hanya terdapat satu trayek yang beroperasi, maka pada tahun 2023 jumlah trayek yang dilayani meningkat menjadi tiga. Perubahan ini mencerminkan upaya peningkatan konektivitas dan efisiensi layanan transportasi sungai di Kabupaten Banyumas.

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menyelaraskan target dengan mempertimbangkan *rerouting* trayek angkutan sungai. Dengan penyesuaian tersebut, Dinas Perhubungan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.





- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas Wilayah tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100	0.785	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

- Dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas apabila disandingkan dengan target renstra telah mencapai target Renstra.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	0.785	0.57	0.40	NA	0.93	0.76	NA

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024





Capaian kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencapai 0,785 dimana dengan capaian Kabupaten sekitar yang sama-sama memiliki angkutan sungai yakni Kabupaten Cilacap di rentan 0,7. Rasio Konektivitas wilayah pada dasarnya tidak ada standar nasional, angka yang dicantumkan pada tabel 3.4 merupakan hasil kinerja capaian tingkat Nasional.

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

**Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target** adalah :

1. Adanya perencanaan strategis yang matang tentang kebutuhan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Banyumas;
2. Ketepatan dalam prioritas anggaran untuk pembangunan baik pemeliharaan infrastruktur perhubungan;

**Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target** adalah Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan. Salah satu contohnya adalah kondisi terminal yang masih diwarnai kios-kios rusak serta fasilitas umum seperti kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Sebagai solusi, pada tahun 2024 telah dialokasikan dana untuk perbaikan drainase dan jalan di area parkir. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna terminal serta mendukung kelancaran operasional.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga





menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2024) (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.851.580.219	17.422.394.953	570.814.734
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.323.722.458	17.117.893.708	11.765.905.364
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	1.000.0000	1.000.000	-
			Efisiensi	-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas Wilayah antara lain :





Tabel 3.7  
Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Tujuan Dinas  
Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	92,63%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase ketersediaan perlengkapan jalan	106.19 %	98,12%
		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	100%	
		Persentase kendaraan yang melakukan uji laik	82.89%	
		prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	117.37%	
		Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	100%	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase prasarana angkutan sungai	111%	99,07%
		Prosentase wilayah yang terhubung angkutan sungai	150%	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas 2024

Dinas Perhubungan memiliki 3 Program untuk menunjang keberhasilan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Mengenai Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 100 % dan realisasi keuangannya mencapai 92,30 %, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan rata-rata capaian kinerja nya 101.29 % dan realisasi keuangannya mencapai 98,12 %, Program Pengelolaan Pelayaran capaian rata-rata kinerjanya adalah 130,05 % dan realisasi keuangannya 99,07 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 program di Dinas Perhubungan Kabupaten





Banyumas telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah terkhusus pada penyelenggaraan perhubungan, terdiri atas 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.422.394.953 dengan realisasi sebesar Rp 16.138.544.561 dengan tingkat capaian sebesar 92.30% ;

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),

Program ini bertujuan meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas, terdiri atas 7 (Tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.117.893.708 dengan realisasi sebesar Rp 16.796.905.621 dengan tingkat capaian sebesar 98,12 % ;

3) Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini bertujuan meningkatnya Pengelolaan Pelayaran, terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 990.650 dengan tingkat capaian sebesar 99,07 %.

2. Sasaran : **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Konektivitas Wilayah**

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Konektivitas Wilayah tahun 2024 ditampilkan pada tabel 3.7 sebagai berikut :





Tabel 3.8  
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja  
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.45	139.19

Tahun 2024 menandai awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Dalam periode ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan satu sasaran dengan tiga indikator utama. Salah satu indikator tersebut adalah Indeks Konektivitas Angkutan Sungai (IK2), yang dihitung menggunakan rumus: (Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut). Adapun Jumlah trayek angkutan sungai yang dilayani di Kabupaten Banyumas sebanyak 3 trayek dengan kebutuhan trayeknya 4 trayek. Kemudian terkait bobot trayek yang didapat adalah 1 dimana Kabupaten Banyumas untuk frekuensi angkutan sungai pada kategori frekuensi tinggi yakni melintas >5x dalam seminggu. Sehingga untuk Indikator ini diperoleh  $(3 \times 1) / 4 = 0.75$ , dengan hasil tersebut diartikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada indikator “Indeks Konektivitas Angkutan Jalan” atau yang biasa disebut IK1 diperoleh dengan rumus (Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut). Adapun Jumlah trayek angkutan sungai yang dilayani di Kabupaten Banyumas sebanyak 121 trayek dengan kebutuhan trayeknya 121 trayek. Kemudian terkait bobot trayek yang didapat adalah 0.8 dimana Kabupaten Banyumas untuk frekuensi rata-rata angkutan jalan pada kategori frekuensi sedang yakni melintas 3-4 kali dalam seminggu. Sehingga untuk Indikator 3 ini diperoleh  $(121 \times 0,8)$





/ 121 = 0.8, dengan hasil tersebut diartikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada indikator “V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota” diperoleh dari rata-rata V/C (Volume/ Capacity) pada 28 Ruas Jalan di Jalan Kabupaten Banyumas. V/C ratio di jalan kabupaten/kota adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang dihitung melalui survey lalu lintas dari per ruas jalan yang kemudian dirata-rata. Adapun data ini adalah data negatif, dimana hasil dari indikator ini adalah 0,45 dari target 0,74. V/C ratio ini dapat menggambarkan kinerja lalu lintas kabupaten/kota, dimana hasil dari indikator ini termasuk pada kategori C yakni lalu lintas Kabupaten Banyumas dapat dikatakan stabil.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan meningkatnya konektivitas wilayah tahun 2024 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 s.d 2024 ditampilkan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 s.d 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2021				
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.125	0.125	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.78	0.78	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.74	100
Tahun 2022				
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.375	0.125	33.33
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100





Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.74	100
Tahun 2023				
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.5	0.75	150
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.6	118.92
Tahun 2024				
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.45	139.19

Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja, serta 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari hasil pengukuran pencapaian terhadap keempat indikator tersebut, secara keseluruhan Dinas Perhubungan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, capaian kinerja Dinas Perhubungan untuk indikator Indeks Konektivitas Angkutan Sungai tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh perhitungan yang berbasis pada jumlah trayek angkutan sungai, sementara di Kabupaten Banyumas hanya terdapat 2 dermaga yang melayani 1 trayek. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil pencapaian indikator tersebut.

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melakukan perhitungan ulang terhadap indikator capaian kinerja. Seiring berjalannya waktu, load factor angkutan sungai di Banyumas





terus meningkat. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, dilakukan rerouting trayek, dari semula 1 trayek menjadi 3 trayek. Perubahan ini berdampak positif pada Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, yang akhirnya melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berhasil mencapai target yang ditentukan. Salah satu indikator penting, VC Ratio, mengalami penurunan dari 0.6 menjadi 0.45. Penurunan ini disebabkan oleh pembukaan jembatan mandirancan pegalongan, yang memperluas persebaran kendaraan dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan Bus Trans Banyumas turut berkontribusi dalam menekan volume kendaraan pribadi, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar dibandingkan tahun 2023.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra
- Perbandingan realisasi kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas Wilayah tahun 2024 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2024			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2024
		Target	Realisasi	%		
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100	0.75	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.45	139.19	0.74	139.19

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024





Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas apabila disandingkan dengan target renstra telah mencapai target Renstra.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)  
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.11  
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	0.75	0.95	0.333	NA	NA	NA	NA
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	0.8	0.957	0.354	0.7	0.93	NA	NA
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.45	NA	NA	0.31	0.31	0.38	NA

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2024

Capaian kinerja dari 3 indikator sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Konektivitas Wilayah di beberapa daerah sekitar memiliki hasil yang berbeda-beda. Terkait standar nasional, untuk ketiga indikator tersebut tidak ada standar nasional yang mengikat, hanya saja pada tabel 3.10 merupakan hasil dari capaian Kementerian Perhubungan. Pada indeks konektivitas angkutan sungai, hitungan tersebut tergantung pada karakteristik masing-masing daerah. Apabila di sandingkan dengan nasional dan provinsi capaian





Kabupaten Banyumas dibawah Nasional dan diatas provinsi. Untuk indeks angkutan jalan Kabupaten Banyumas juga tidak jauh dari capaian nasional. Mengenai V/C Ratio Kabupaten Banyumas masuk di kategori tingkat pelayanan lalu lintas C, dimana tingkat tersebut di rentan 0,45-0,74. Tingkat pelayanan C memiliki arti arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan.

- f. penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

**Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target** adalah :

1. Sosialisasi penggunaan angkutan umum seperti Banyumas Raya Trans berjalan efektif;
2. Optimalnya penerapan kebijakan trayek angkutan umum;
3. Sosialisasi penggunaan angkutan sungai banyumas berjalan efektif;
4. Optimalnya penerapan kebijakan trayek angkutan sungai;

**Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target** adalah

1. Adanya hambatan pada terbatasnya anggaran untuk sosialisai secara langsung kepada masyarakat terkait angkutan banyumas, sehingga solusi kami memanfaatkan social media terkait sosialisai tentang angkutan banyumas;
2. Belum tersusunnya dokumen kajian trayek serta terbatasnya anggaran untuk meningkatkan infrastruktur konektivitas jalan. Solusi kami adalah melakukan Kerjasama dengan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas untuk penyusunan kajian lalu lintas dan pembuatan peraturan bupati (Perbup) terkait pelayanan perhubungan. Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Perhubungan memperoleh tambahan anggaran fiskal yang dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur konektivitas jalan.





- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
  - 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
  - 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
  - 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.12  
Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2024) (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.636.213.844	17.422.394.953	786.181.109
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.351.988.344	17.117.893.708	11.765.905.364





No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2024) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2024) (Rp)	Selisih (Rp)
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	1.000.0000	1.000.000	-
			Efisiensi	-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

- h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas Wilayah antara lain :

Tabel 3.13  
Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	92,63%
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase ketersediaan perlengkapan jalan	106.19 %	98,12%
		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	100%	
		Persentase kendaraan yang melakukan uji laik	82.89%	
		prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	117.37%	





No	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Kinerja	Realisasi keuangan
		Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	100%	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase prasarana angkutan sungai	111%	99,07%
		Prosentase wilayah yang terhubung angkutan sungai	150%	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas 2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melaksanakan tiga program utama untuk mendukung pencapaian tujuan strategisnya. Ketiga program ini tidak hanya menunjukkan kinerja yang optimal tetapi juga efisiensi dalam penggunaan anggaran. Berikut rincian pencapaiannya:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah, khususnya di sektor perhubungan. Program ini mencakup 13 kegiatan dan 35 sub-kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.422.394.953. Realisasi anggaran mencapai Rp 16.138.544.561 atau 92,30%.

2) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas. Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 14 sub-kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 17.117.893.708. Realisasi anggaran mencapai Rp 16.796.905.621 atau 98,12%.

3) **Program Pengelolaan Pelayaran**

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan pelayaran





di Kabupaten Banyumas. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub-kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 1.000.000. Realisasi anggaran mencapai Rp 990.650 atau 99,07%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga program ini telah berjalan dengan baik, mencapai target kinerja yang tinggi, serta menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran guna mendukung transportasi yang lebih baik di Kabupaten Banyumas.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 target pendapatan Retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp 3.180.399.795. Selanjutnya pada akhir tahun 2024 Dinas Perhubungan mencapai realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp 3.043.830.044 (sebesar 95.70% dari target).

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp 28.891.951.911,00 Sedangkan untuk anggaran Belanja Modal Tahun 2024 Dinas Perhubungan sebesar Rp 5.649.336.750,00 dengan jumlah keseluruhan Rp 34.541.288.661,00 dan pada akhir tahun anggaran 2024 capaian realisasi sebesar Rp 32.936.440.832 atau sebesar 95.35 %

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
Belanja Modal	Rp 5.649.336.750	Rp 5.589.165.912	Rp 60.170.838
Belanja Operasi	Rp 28.891.951.911	Rp 27.347.274.920	Rp 1.544.676.991
Jumlah	Rp 34.541.288.661	Rp 32.936.440.832	Rp 1.604.847.829

Untuk realisasi anggaran per sasaran kegiatan akan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran  
Dinas Perhubungan Per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Prosentase
				Realisasi Anggaran
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rp 34.541.288.661	Rp 32.936.440.832	95.35 %





No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Prosentase
				Realisasi Anggaran
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	Rp 34.541.288.661	Rp 32.936.440.832	95.35 %

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran akan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.16

Tingkat Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	100	Rp 32.936.440.832	95.35%
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	3	113.06	Rp 32.936.440.832	95.35%

Untuk tingkat efisiensi anggaran terhadap penggunaan sumber daya akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.17

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	100	95.35	4.65
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	3	113.06	95.35	17.71

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.





Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 71 Paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 5.971.509.976, realisasi kontrak sebesar Rp 5.945.852.264, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 25.657.712, atau 0.43%

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-catalog* dilaksanakan dengan metode *e-purchasing* dan pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 33 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 2.959.430.110, realisasi pengadaan sebesar Rp 2.942.002.200, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 17.427.910, atau 0.59 %.

#### E. PRESTASI DINAS PERHUBUNGAN

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas cukup memberikan berbagai prestasi yang membanggakan, yakni sebagai berikut :

##### 1. NOMINATOR INOVASI INTEGRASI ANTARMODA TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

Pada tanggal 6 Agustus 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas membantu Pemerintah Kabupaten Banyumas meraih penghargaan sebagai nominator inovasi integrasi antarmoda transportasi dan sistem transportasi berkelanjutan di Hub Space 2024 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya kepada Sekda Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie.







BAB IV  
PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian kinerja rata-rata sasaran	Predikat
1	Tujuan OPD:	1	100 %	Tercapai
2	Sasaran 1:	3	113.06 %	Tercapai

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 indikator kinerja tersebut, secara umum Dinas Perhubungan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan predikat sangat tinggi.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024





sebesar Rp 34.541.288.661 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 32.936.440.832 dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 terdapat Silpa sebesar Rp 1.604.847.829

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 telah menggunakan anggaran sebesar Rp 32.936.440.832 dan telah mewujudkan capaian kinerja dengan peringkat “Sangat Tinggi” sesuai Skala pemeringkatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sudah bagus dan perlu dipertahankan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah 95,35 % dari total anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukan bahwa Dinas Perhubungan dapat menghemat anggaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

## **B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dalam perjalanan mencapai target empat indikator, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menghadapi beberapa hambatan. Namun, berkat upaya mencari solusi, Dinas Perhubungan tetap berhasil mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Penyelesaian terhadap isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana penunjang kinerja lalu lintas, seperti marka, rambu, dan penggantian traffic light yang terintegrasi dengan ATCS, masih belum memadai. Potensi hambatan muncul dalam bentuk biaya maintenance/perawatan ATCS yang tinggi, memerlukan alokasi anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, kami melakukan prioritas penggunaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada persimpangan yang diatur dengan alat pengatur isyarat lalu lintas. Selain itu dengan semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas maka Traffic light yg responsif dan terintegrasi juga sangat diperlukan agar tdk terjadi antrian yg panjang di simpang. Tahun 2024 Dinas Perhubungan telah mendapat





dana fiscal yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah.

2. Dalam upaya mencapai indikator kinerja terkait pelaksanaan program BTS Load factor, Kabupaten Banyumas menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran APBD untuk dokumen trayek yang diperlukan dalam pengukuran kinerja trayek. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Kementerian Perhubungan dan PT. Banyumas Raya Transportasi, untuk menciptakan moda transportasi yang aman dan nyaman, yakni Bus Rapid Transit. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program dan mencapai hasil yang optimal. Serta dapat dilihat bahwa dengan adanya pengoptimalisasi pemanfaatan Banyumas Raya Transportasi.
3. Dalam upaya mencapai indikator kinerja terkait konektivitas angkutan sungai, Kabupaten Banyumas menghadapi situasi di mana pada tahun 2024 hanya terdapat dua halte sungai, yaitu Halte Sungai Desa Papringan dan Halte Sungai Desa Tambaknegara. Meskipun demikian, pelaksanaan di kedua halte tersebut menemui beberapa kendala, terutama terkait ketidaktersediaan rambu-rambu sungai. Kami terus menjalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari APBN guna pembangunan Dermaga Kedunguter. Dokumen Rencana Teknis (DED) Dermaga Kedunguter telah disusun, dan rencananya pembangunan Dermaga Kedunguter akan segera dilaksanakan.
4. Terkait dengan kegiatan pengoperasional terminal
  - a. Di Kabupaten Banyumas, saat ini ada 5 terminal yang sudah beroperasi yaitu 1) Terminal bulupitu 2) Terminal ajibarang 3) Terminal wangon 4) Terminal karanglewas an 5) Terminal Baturraden.
  - b. Pengoperasionalan terminal pada tahun 2024 menghadapi tantangan serius akibat masih banyaknya kios yang mengalami kerusakan serta fasilitas umum yang rusak, termasuk kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase. Kerusakan kios berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Daerah karena kios yang tidak dapat disewakan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan





menyeluruh pada kios yang rusak guna memastikan ketersediaan dan fungsionalitasnya

- c. Selain itu, dalam menghadapi kendala fasilitas umum, telah dilakukan penyesuaian anggaran tahun 2024 dengan menetapkan alokasi dana untuk perbaikan drainase dan perbaikan jalan di area parkir. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna terminal serta mendukung operasional yang lancar. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan fasilitas umum yang berkualitas akan meningkatkan citra dan pelayanan terminal, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang optimal bagi daerah.
  - d. Pada tahun 2024, proyek pembangunan Terminal Sokaraja telah dimulai.
5. Terkait dengan kegiatan angkutan
- a. Adanya ketentuan usia teknis kendaraan untuk Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan berdasarkan Perda No. 1 tahun 2015, seiring dengan Permen No. 98 Tahun 2019 yang menetapkan usia teknis Angkutan Kota selama 20 tahun dan Angkutan Pedesaan selama 15 tahun. Kondisi ini mengakibatkan beberapa kendaraan tidak dapat melaksanakan izin trayeknya karena telah melewati batas usia yang diatur, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  - b. Diperlukan kajian teknis terkait jumlah kendaraan di suatu kawasan untuk menentukan kuota layanan, mengingat belum adanya pengaturan terkait berapa kendaraan yang akan melayani dalam satu kawasan. Hal ini menjadi krusial agar para penumpang dapat terlayani dengan baik dan sampai ke kawasan tujuan mereka.
  - c. Habisnya MoU Trans Banyumas Program Buy The Service pada akhir tahun 2025 maka mulai Tahun 2026 pemda Banyumas harus mulai mengambil alih / hand over Program BTS secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, salah satunya anggaran bersumber dari 10% opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama Tahun 2024. Semoga Dinas Perhubungan dapat selalu meningkatkan





kinerja organisasi guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

**Kabupaten Banyumas, 31 Januari 2025**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**AGUS SRIYONO, ATD., S.IP., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670801 199203 1 006